

## BAB V

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### 5.1. Gambaran Data Penelitian

Untuk menganalisis SILPA pada APBD pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2013-2017, maka dibutuhkan data anggaran dan realisasi APBD pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun anggaran bersangkutan. Data anggaran dan realisasi APBD tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1

Berdasarkan data anggaran dan realisasi APBD pada tabel 5.1 menunjukkan anggaran dan realisasi APBD selama TA 2013-2017 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Daerah.

Tingkat realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 104,51% dari yang dianggarkan, dan didominasi oleh item Pendapatan dana Perimbangan sebesar 106,75%. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 97,98 % dari yang dianggarkan.

Pendapatan daerah mencakup:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah. Tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 109,76% dari yang dianggarkan, yang didominasi oleh pendapatan pajak daerah yakni dengan tingkat realisasi

yang dicapai sebesar 112,73%.. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 99,18% dari yang dianggarkan.

- 2) Pendapatan Dana Perimbangan, yang terdiri dari: Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan dana Alokasi Khusus. Realisasi Dana Perimbangan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 106,75% dari yang dianggarkan, yang didominasi oleh DAU (Dana Alokasi Umum).
- 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah, yang terdiri dari: dana kontigensi atau penyeimbang, dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, bantuan dana pasca bencana alam, dan penerimaan dari pihak ke tiga. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 100,96% dari yang dianggarkan dan didominasi oleh Dana penyesuaian dan otonomi khusus.

b) Belanja Daerah.

Tingkat realisasi Belanja daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 97,03% dari yang dianggarkan, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2017 yakni 92,55% dari yang dianggarkan. Belanja daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencakup:

1) Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Tingkat realisasi belanja tidak langsung tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 98,90% dari yang dianggarkan dan didominasi oleh Belanja Hibah yang realisasinya sebesar 101,03%. Sedangkan realialisasi terendah terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 95,01% dari yang dianggarkan

2) Belanja Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Tingkat realisasi Belanja Daerah Belanja daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 97,03% dari yang dianggarkan, dan didominasi oleh belanja tidak langsung yakni sebesar 98,90% dari yang dianggarkan. Sedangkan tingkat realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 92,55%

#### b) Surplus/Defisit

Surplus terjadi apabila realisasi pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sedangkan defisit terjadi jika realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja. Surplus tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan terendah terjadi pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi NTT pada tahun tersebut telah efisien dalam penggunaan dana, dan berdasarkan data menunjukkan bahwa semua realisasi belanja tidak mencapai target. Hal tersebut terjadi kemungkinan terdapat beberapa kegiatan

tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh adanya perencanaan kurang yang baik.

c) Pembiayaan.

Pembiayaan adalah penerimaan pemerintah daerah propinsi NTT selama tahun 2013-2017 yang bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan dan pemberian pinjaman daerah, yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus APBD propinsi NTT selama periode tersebut. Tingkat realisasi Pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 117% dari yang dianggarkan, dan terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 98,73%.

d) Pembiayaan Neto.

Pembiayaan neto diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi NTT selama tahun 2013-2017. Tingkat realisasi pembiayaan neto tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 116,95%, dan terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 98,73%.

e) SILPA.

SILPA diperoleh dari surplus ditambah pembiayaan neto yang terjadi pada pemerintahan provinsi NTT selama tahun 2013-2017. SILPA tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp282.888.718.768,00. Sedangkan SILPA terendah terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar Rp158.726.023.789,00.

Berikut adalah data anggaran dan realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun anggaran sejak 2013-2017 :

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2013 S/D 2016**

URAIAN	TA 2013			TA 2014			TA 2015			TA 2016		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	2,373,917,028,200	2,387,439,508,423	100.57	2,748,513,237,168	2,787,513,320,667	101.42	3,353,173,473,800	3,315,669,415,296	98.88	3,708,327,498,000	3,875,554,164,669	104.51
1. Pendapatan Asli Daerah	476,687,746,171	523,201,203,067	109.76	734,805,391,648	736,300,806,702	100.20	872,546,745,800	882,315,240,378	101.12	1,003,412,656,000	995,186,120,952	99.18
a. Pendapatan Pajak daerah	322,652,941,000	363,720,612,876	112.73	548,875,119,224	559,803,345,782	101.99	658,726,117,000	662,667,383,501	100.60	729,670,235,500	745,481,335,512	102.17
b. Pendapatan retribusi Daerah pendapatan bagian laba BUMD dan investasinya	11,609,614,000	8,589,942,871	73.99	26,410,373,000	18,447,549,341	69.85	38,278,885,000	32,888,198,526	85.92	45,769,704,000	77,139,883,317	168.54
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	53,316,821,798	53,317,240,346	100.00	63,445,962,924	63,445,962,924	100.00	71,575,348,634	71,557,011,784	99.97	77,639,882,000	77,139,883,317	99.36
d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah	89,108,369,373	97,573,406,947	109.50	96,073,936,500	121,603,948,655	126.57	103,966,395,166	115,202,646,567	110.81	150,332,834,500	132,146,764,331	87.90
2. Pendapatan Dana perimbangan	1,172,962,967,029	1,165,848,622,974	99.39	1,297,158,719,520	1,282,745,317,275	-	1,512,721,680,000	1,461,922,422,707	96.64	2,660,112,890,000	2,839,657,758,567	106.75
Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Bukan Pajak	91,148,604,029	84,034,259,793	92.19	73,235,219,520	76,821,847,275	104.90	87,830,015,000	60,821,837,707	69.25	82,850,960,000	91,213,201,567	110.09
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	1,003,991,703,000	1,003,991,703,000	100.00	1,131,687,590,000	1,131,687,590,000	100.00	1,300,445,875,000	1,300,445,875,000	100.00	1,144,859,430,000	1,337,091,848,000	116.79
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	77,822,660,000	77,822,660,000	100.00	74,235,910,000	74,235,910,000	100.00	100,654,710,000	100,654,710,000	100.00	1,432,402,500,000	1,411,352,709,000	98.53
3. Lian-lain Pendapatan Yang sah	724,266,315,000	698,389,628,563	-	734,402,126,000	741,467,166,700	100.96	967,905,048,000	971,431,752,211	100.36	44,801,952,000	40,710,285,150	90.87
a. Dana Kontigensi/Penyeimbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Dana Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pmda lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	717,287,620,000	692,946,195,000	96.61	716,402,300,000	733,921,280,000	102.45	954,743,400,000	963,785,415,282	100.95	33,938,823,000	33,938,823,000	100.00
f. Bantuan keuangan dari provinsi atau pmda lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g. Bantuan Dana pasca bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h. Penerimaan dari pihak ketiga	6,978,695,000	5,443,487,563	78.00	6,431,866,000	4,773,048,725	74.21	-	-	-	-	-	-
BELANJA	2,558,600,227,797	2,375,665,880,320	92.85	2,892,838,752,928	2,688,932,744,282	92.95	3,523,978,561,028	3,328,496,113,665	94.45	3,816,240,501,789	3,702,912,449,649	97.03
3 Belanja Tidak Langsung	1,705,086,852,072	1,619,918,226,955	95.01	1,809,053,974,572	1,733,924,105,031	95.85	2,071,352,295,000	2,044,792,232,932	98.72	2,419,872,748,789	2,393,234,089,254	98.90
Belanja pegawai	454,502,772,650	43,913,626,575	9.66	487,828,828,000	464,311,717,288	95.18	505,472,529,000	506,293,029,402	100.16	548,142,207,000	542,985,141,299	99.06
Belanja Hibah	1,021,326,376,075	987,227,894,156	96.66	929,466,892,000	932,299,199,876	100.30	1,165,969,584,000	1,171,350,213,743	100.46	1,457,068,750,000	1,472,015,600,000	101.03
Belanja bantuan Sosial	46,542,882,000	32,312,017,500	69.42	35,427,393,464	22,191,490,393,464	62.639	28,337,378,000	20,957,580,000	73.96	10,848,900,000	10,848,900,000	100.00
Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten.kota dan pemerintahan desa	149,128,821,347	141,657,475,918	94.99	298,571,116,108	267,099,624,615	89.46	331,907,887,000	317,680,998,260	95.71	381,323,836,789	381,786,045,455	100.12

URAIAN	TA 2013			TA 2014			TA 2015			TA 2016		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/kota dan pemerintahan Desa	15,456,000,000	15,209,207,000	98.40	34,176,400,000	29,252,565,000	85.59	32,164,917,000	27,459,614,000	-	20,489,055,000	19,448,994,000	94.92
Belanja Tak terduga	18,130,000,000	4,375,367,806	24.13	23,583,345,000	18,769,507,737	79.59	7,500,000,000	1,050,797,527	14.01	2,000,000,000	1,149,407,500	57.47
4. Belanja langsung	853,513,375,725	755,747,653,365	88.55	1,090,229,901,356	955,008,639,251	87.60	1,452,626,266,028	1,283,703,880,733	88.37	1,396,367,753,000	1,309,678,360,395	93.79
Belanja Pegawai	112,830,051,536	104,954,155,869	93.02	80,205,691,920	77,655,755,800	96.82	95,187,272,669	902,070,775,782	947.68	104,151,030,808	101,681,932,485	97.63
Belanja barang dan jasa	475,045,429,289	425,613,121,224	89.59	534,328,425,479	469,752,094,481	87.91	660,586,516,012	586,930,890,374	88.85	659,014,245,790	605,697,383,275	91.91
belanja Modal	236,637,894,900	225,180,376,272	95.16	475,695,783,957	407,600,788,970	85.69	696,852,477,347	606,702,214,577	87.06	633,202,476,402	602,299,044,635	95.12
3. Surplus	184,683,199,597	11,773,628,103	6.38	150,917,638,760	98,580,576,395	65.32	170,805,087,228	12,826,698,369	7.51	107,913,003,789	172,641,715,020	159.98
4. PEMBIAYAAN	184,683,199,597	215,990,186,857	117	150,917,638,760	149,542,638,833	99.09	170,805,087,228	171,552,722,158	100.44	111,296,492,789	110246903748%	
1. Penerimaan pembiayaan	244,553,199,597	245,983,000,857	100.58	236,731,163,760	235,104,723,833	99.31	255,505,087,228	254,559,322,158	99.63	166,296,492,789	165,206,703,748	99.34
Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah tahun Sebelumnya (SILPA)	179,315,118,647	179,264,504,331	99.97	227,763,814,960	227,763,814,960	100.00	248,123,215,228	248,468,739,029	100.14	158,726,023,789	158,726,023,789	100.00
Pendairan dana adangan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	57,470,732,150	57,470,732,150	100.00	8,967,348,800	7,340,908,873	81.86	7,381,872,000	6,090,583,129	82.51	7,570,469,000	6,480,679,959	85.60
2. Pengeluaran pembiayaan	59,870,000,000	29,992,814,000	50.10	85,813,525,000	85,562,085,000	81.86	84,700,000,000	83,006,600,000	98.00	55,000,000,000	54,959,800,000	99.93
Penyertaan modal (investasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemerintah Daerah	54,870,000,000	25,000,000,000	45.56	75,870,000,000	75,870,000,000	99.71	75,000,000,000	75,000,000,000	100.00	50,000,000,000	54,959,800,000	109.92
pemberian Pinjaman Daerah	5,000,000,000	4,992,814,000	99.86	6,200,000,000	5,948,560,000	95.94	9,700,000,000	9,700,000,000	100.00	5,000,000,000	4,959,800,000	99.20
Pengeluaran pembiayaan untuk ternak sapi	-	-	-	3,743,525,000	3,743,525,000	100.00	-	-	-	-	-	-
5. Pembiayaan Netto	184,683,199,597	215,990,186,857	116.95	150,917,638,760	149,542,638,833	99.09	170,805,087,228	171,552,722,158	100.44	111,296,492,789	110,246,903,748	99.06
6. Sisa Lebih Perhitungan Tahun berkenaan (SILPA) (3+5)	-	227,763,814,960	#DIV/0!	-	24,812,325,228	#DIV/0!	-	158,726,023,789	#REF!	3,383,489,000	282,888,618,768	8,360.86

## 5.2 Analisis dan Pembahasan

### 5.2.1 Pertumbuhan SILPA Pada APBD Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013-2017

Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa SILPA diperoleh dari surplus ditambah pembiayaan neto yang terjadi pada pemerintahan provinsi NTT selama tahun 2013-2017. SILPA tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp282.888.718.768,00. Sedangkan SILPA terendah terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar Rp158.726.023.789,00. Pertumbuhan SILPA Pada APBD Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini.

**Tabel 5.2**  
**Pertumbuhan SILPA**  
**APBD Pemerintah Provinsi NTT**  
**Tahun Anggaran 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>SILPA (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2013	227.763.814.960	
2014	248.123.215.228	9
2015	158.726.023.789	(36)
2016	282.888.618.768	78
2017	273.576.825.165	(3)

**Sumber:** BPPKAD Provinsi NTT, 2018, diolah.

Kondisi SILPA sebagaimana terlihat pada tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa SILPA periode 2013 s/d 2017 mengalami fluktuasi. SILPA pada periode 2013 ke 2014 mengalami peningkatan sebesar 9%. Sementara SILPA dari tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan sebesar 36 %. Sedangkan SILPA dari tahun 2015 ke 2016 naik sebesar 78%. SILPA dari tahun 2016-2017 kembali mengalami penurunan sebesar 3%. Faktor-faktor yang mengakibatkan turun-naiknya SILPA dibahas pada bagian 5.2.2.

### 5.2.2. Analisis Faktor- Faktor Penyebab Timbulnya SILPA pada APBD Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013-2017

Pada akhir tahun Anggaran 2013-2017, APBD Pemerintah NTT selalu memperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). SILPA tersebut timbul disebabkan oleh pelampauan pendapatan daerah, penghematan belanja, serta sisa dana dari kegiatan yang dilakukan oleh tiap satuan kerja dilingkup Pemerintah Provinsi NTT. Dengan melihat tabel 5.3 di bawah ini akan diperoleh gambaran untuk kemudian dianalisis tentang faktor-faktor penyebab timbulnya SILPA pada tahun anggaran 2013-2017.

#### 1. Tahun Anggaran 2013

Pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh SILPA sebesar Rp 227.763.814.960,00 SILPA tersebut merupakan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi selama tahun anggaran 2013. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi NTT selama tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah 5.3.

Dari data pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2013 terjadi pelampauan pendapatan daerah serta penghematan belanja yang cukup besar yang pada akhir tahun anggaran menimbulkan SILPA sebesar Rp 227.763.814.980,00. Data tabel menunjukkan bahwa penyumbang terbesar dalam jumlah SILPA yang timbul pada tahun anggaran 2013 yaitu penghematan belanja daerah yang terjadi sebesar Rp 182.934.347.477,00 atau penghematan sebesar 7,15% dari target pemerintah Provinsi NTT.



Tabel 5.3  
Perolehan SILPA pada APBD Pemerintah Provinsi NTT  
Tahun Anggaran 2013 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Daerah	2.373.917.028.200	2.387.439.508.423	13.522.480.223
Belanja Daerah	2.558.600.227.797	(2.375.665.880.320)	(182.934.347.477)
<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>11.773.628.103</b>	
Penerimaan Pembiayaan	244.553.199.597	245.983.000.857	1.429.801.260
Pengeluaran Pembiayaan	59.870.000.000	(29.992.814.000)	(29.877.186.000)
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>215.990.186.857</b>	
<b>SILPA</b>		<b>227.763.814.960</b>	

*Sumber : BPPKAD Provinsi NTT (APBD Provinsi NTT), 2018*

Berdasarkan data pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya SILPA pada APBD Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013 adalah :

a. Pelampauan Pendapatan Daerah

Pelampauan pendapatan daerah terjadi sebesar Rp 13.552.480.223,00 dari yang telah dianggarkan disebabkan oleh:

1. Pelampauan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pelampauan Pendapatan Dana Perimbangan
3. Dan pelampauan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Berdasarkan data pada Tabel 5.1 penyebab utama pelampauan PAD tersebut adalah penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pajak serta retribusi yang diperoleh Pemerintah NTT merupakan penyumbang terbesar pelampauan realisasi PAD tersebut. Dari sisi pajak, bea balik nama kendaraan bermotor merupakan potensi paling besar sumbangannya kepada penerimaan PAD dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Dalam tahun 2013 bea balik nama

kendaraan bermotor dianggarkan sebesar Rp 132.188.354.000,00 kemudian pada akhir tahun anggaran jumlah bea balik nama kendaraan bermotor yang terealisasi adalah sebesar Rp 164.481.895.350,00. Jumlah kendaraan baru yang masuk terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan dan daya beli masyarakat NTT menyebabkan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut melampaui sebesar Rp 32.293.541.350,00 dari target pemerintah daerah. Dari sisi retribusi, tingkat kebutuhan pelayanan dari masyarakat, baik retribusi jasa pelayanan kesehatan maupun jasa perijinan yang meningkat berdampak pada penerimaan retribusi yang juga terus bertambah.

b. Penghematan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penghematan belanja daerah sebesar Rp182.934.347.477,00, kontribusi terbesar adalah item belanja tidak langsung yakni unsur belanja pegawai yang dilakukan Pemerintah NTT. Penghematan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap belanja pegawai didasari oleh terjadinya mutasi pegawai, kematian, bahkan adapula jabatan yang tidak terisi. Hal ini ditunjukkan oleh anggaran belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 454.502.772.650,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 439.136.264.575,00 atau terjadi penghematan sebesar 9,66% sehingga mengakibatkan belanja pegawai mengalami penghematan sebesar Rp 410.589.146.075,00.

c. Sisa Dana Kegiatan

Sisa dana kegiatan terdiri dari dua jenis yaitu kegiatan yang sama sekali belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah hingga tahun anggaran berakhir, maupun kegiatan yang telah dilaksanakan, namun masih memiliki sisa anggaran yang untuk kemudian disetorkan kembali pada kas daerah. Dari hasil wawancara dengan bagian akuntansi pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran total uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) dalam kas bendahara pengeluaran Satuan Kerja dan belum disetorkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebesar Rp 9.403.299.920,00 atau sebesar 0,40% dari total anggaran belanja daerah. Yang dimaksudkan dengan sisa dana ini adalah sisa anggaran belanja daerah dari setiap Satuan Kerja dalam lingkup satuan kerja provinsi NTT. Satuan Kerja yang memiliki saldo uang untuk dipertanggungjawabkan kembali yang paling besar adalah Sekretariat Daerah.

2. Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh SILPA sebesar Rp 248.123.215.228,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp20.359.400.268,00 atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan SILPA tahun anggaran 2013. Data pada tabel 5.4 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2014 terjadi pelampauan pendapatan daerah serta penghematan belanja yang cukup besar yang pada akhir tahun anggaran menimbulkan SILPA sebesar Rp 248.123.215.228,00. Data tabel 5.4 menunjukkan bahwa penyumbang terbesar

dalam jumlah SILPA yang timbul pada tahun anggaran 2014 yaitu penghematan belanja daerah yang terjadi sebesar Rp 210.351.131.646,00 atau sebesar 8% dari yang dianggarkan.

Tabel 5.4  
Perolehan SILPA pada APBD Pemerintah Provinsi NTT  
Tahun Anggaran 2014 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Daerah	2.748.513.237.168	2.787.513.320.667	39.000.083.488
Belanja Daerah	2.899.238.875.928	(2.688.932.744.282)	(210.351.171.646)
<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>98.580.576.385</b>	
Penerimaan Pembiayaan	236.731.163.760	235.104.723.833	1.626.439.927
Pengeluaran Pembiayaan	85.813.525.000	(85.562.085.000)	(251.440.000)
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>149.542.638.833</b>	
<b>SILPA</b>		<b>248.123.215.218</b>	

*Sumber : BPPKAD Provinsi NTT (APBD Provinsi NTT), 2018*

Berdasarkan data pada tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang turut menyebabkan terjadinya SILPA pada tahun APBD Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 adalah :

a. Pelampauan Pendapatan Daerah

Pelampauan pendapatan daerah terjadi sebesar Rp 39.000.083.488,00 dari yang telah dianggarkan. Penelitian menunjukkan bahwa pelampauan pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh:

- 1) Pelampauan Realisasi Pendapatan Asli Daerah,
- 2) Pelampauan Pendapatan Dana Perimbangan,
- 3) dan pelampauan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Berdasarkan data pada Tabel 5.1 penyebab utama pelampauan PAD adalah:

- a) Pelampauan Penerimaan Pajak Daerah
- b) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Dari sisi penerimaan pajak daerah, bea balik nama kendaraan bermotor merupakan potensi paling besar sumbangannya kepada penerimaan PAD dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Dalam tahun 2014 bea balik nama kendaraan bermotor dianggarkan sebesar Rp 144.046.044.000,00 kemudian pada akhir tahun anggaran jumlah bea balik nama kendaraan bermotor yang terealisasi adalah sebesar Rp 175.214.861.575,00. Jumlah kendaraan baru yang masuk terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan dan daya beli masyarakat NTT menyebabkan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut melampaui sebesar Rp 31.168.817.575,00 atau 18% dari target pemerintah daerah. Dari sisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang meningkat juga memberi kontribusi terhadap meningkatnya PAD yakni sebesar Rp25.530.012.155,00 atau 21% dari yang dianggarkan.

b. Penghematan Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi NTT melakukan penghematan belanja yang cukup banyak yaitu sebesar Rp 210.351.171.646.00 Sama dengan tahun sebelumnya penghematan belanja terbesar juga terjadi pada belanja pegawai. Terjadinya mutasi pegawai, kematian, dan kekosongan jabatan selama tahun anggaran tersebut merupakan penyebab utama terjadinya penghematan terhadap belanja pegawai. Selain belanja pegawai, belanja bantuan sosial yang tidak terserap pada tahun 2014 adalah sebesar Rp

22.156.063.000.000,00 dari anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp14.230.864.500,00. Perencanaan anggaran belanja bantuan sosial yang kurang matang menyebabkan sejumlah anggaran belanja bantuan sosial tidak terserap.

c. Sisa Dana Kegiatan

Dalam tahun anggaran 2014 juga terdapat beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi namun belum dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan tetapi masih memiliki sisa dana sehingga perlu disetor kembali kepada Bendahara Umum Daerah. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, total keseluruhan saldo uang untuk dipertanggungjawabkan dalam kas bendahara pengeluaran dari setiap Satuan Kerja dilingkup Provinsi NTT belum disetorkan kepada BUD adalah sebesar Rp 13.586.687.651,00. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa adanya Sisa uang tersebut disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga harus dikembalikan ke kas daerah.

3. Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Provinsi NTT memperoleh SILPA sebesar Rp 158.726.023.789,00. SILPA tersebut merupakan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi selama tahun anggaran 2015. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi NTT selama tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5  
Perolehan SILPA pada APBD Pemerintah Provinsi NTT  
Tahun Anggaran 2015 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Daerah	3.353.173.473.800	3.315.669.415.296	37.504.058.504
Belanja Daerah	3.523.978.561.028	(3.328.496.113.665)	(195.482.447.363)
<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>(12.826.698.369)</b>	
Penerimaan Pembiayaan	255.505.087.228	254.559.322.158	(954.765.070)
Pengeluaran Pembiayaan	84.700.000.000	(83.006.600.000)	(1.693.400.000)
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>171.552.722.158</b>	
<b>SILPA</b>		<b>158.726.023.789</b>	

*Sumber : BPPKAD Provinsi NTT (APBD Provinsi NTT), 2018*

SILPA yang timbul pada tahun 2015 kembali meningkat daripada tahun sebelumnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyumbang terbesar bagi jumlah SILPA pada tahun anggaran 2015 adalah penghematan belanja yang juga lebih banyak jumlahnya dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. SILPA yang meningkat tersebut disebabkan oleh :

a. Pelampauan Pendapatan Daerah

Berdasarkan data tabel 5.5 di atas, pelampauan pendapatan daerah terjadi sebesar Rp37.504.058.504,00 dari yang telah dianggarkan. Penelitian menunjukkan bahwa pelampauan pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh:

- 1) Pelampauan Realisasi Pendapatan Asli Daerah,
- 2) Pelampauan Pendapatan Dana Perimbangan,
- 3) dan pelampauan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Berdasarkan data pada Tabel 5.1 penyebab utama pelampauan PAD tersebut adalah penerimaan pajak daerah. Pajak yang diperoleh Pemerintah NTT

merupakan penyumbang terbesar pelampauan realisasi PAD tersebut. Dari sisi penerimaan pajak daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan potensi paling besar sumbangannya kepada penerimaan PAD dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Dalam tahun 2015 pajak bahan bakar kendaraan bermotor dianggarkan sebesar Rp 127.000.000.000,00 kemudian pada akhir tahun anggaran jumlah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terealisasi adalah sebesar Rp 141.254.645.670,00. Jumlah kendaraan baru yang masuk terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan dan daya beli masyarakat NTT menyebabkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersebut melampaui sebesar Rp 14.254.645.670,00 atau 10% dari target pemerintah daerah.

b. Penghematan Belanja

Dari hasil penelitian yang dilakukan realisasi belanja daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT mengalami penghematan yang cukup besar jumlahnya yakni sebesar Rp 195.482.447.363,00 dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan.

c. Sisa Dana Kegiatan

Sama seperti 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya, pada tahun anggaran 2015 terdapat juga kegiatan-kegiatan yang pada awalnya direncanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT belum terealisasi hingga tahun 2015 berakhir. Hal ini menimbulkan penyetoran kembali dana program kepada Bendahara Umum Daerah. Selain itu kegiatan dan program yang telah direalisasikan masih memiliki sisa dana kegiatan yang kemudian disetorkan sisa dana tersebut kepada kas daerah. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 sisa uang untuk



dipertanggungjawabkan dalam kas bendahara pengeluaran yang belum disetor adalah sebesar Rp 5.948.429.460,00.

#### 4. Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh SILPA Rp 282.888.618.768,00. SILPA tersebut merupakan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi selama satu tahun anggaran. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi NTT selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.6  
Perolehan SILPA pada APBD Pemerintah Provinsi NTT  
Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)
Pendapatan Daerah	3.708.327.498.000	3.875.554.164.669	167.226.666.669
Belanja Daerah	3.816.240.501.789	(3.702.912.449.649)	(113.328.052.140)
<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>172.641.715.020</b>	
Penerimaan pembiayaan	166.296.192.789	165.206.703.748	(1.089.489.041)
Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000.000	(54.959.800.000)	(40.200.000)
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>110.246.903.748</b>	
<b>SILPA</b>		<b>282.888.618.768</b>	

*Sumber : BPPKAD Provinsi NTT (APBD Provinsi NTT), 2018*

Berdasarkan data pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab SILPA pada Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut.

##### a. Pelampauan Pendapatan Daerah

Berdasarkan data tabel 5.6 di atas, pelampauan pendapatan daerah terjadi sebesar Rp167.226.666.669,00 dari yang telah dianggarkan. Penelitian

menunjukkan bahwa pelampauan pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh realisasi Pendapatan dana perimbangan yang melampaui target dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Berdasarkan data pada Tabel 5.1 penyebab utama pelampauan Pendapatan dana perimbangan tersebut adalah: pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dalam tahun 2016 Pendapatan Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp2.660.112.890.000,00. Sementara yang terealisasi sebesar Rp2.839.657.758.567,00. Faktor utama yang memberikan kontribusi atas pelampauan Pendapatan dana perimbangan adalah pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak yakni yang dianggarkan sebesar Rp 82.850.960.000,00 kemudian pada akhir tahun anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp 91.213.201.567,00 atau melampaui sebesar Rp 8.362.567,00 atau 9% dari target pemerintah daerah..

#### b. Penghematan Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Provinsi NTT melakukan penghematan sebesar Rp 113.328.052.140,00 atau 2,97% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2015. Sama dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya penghematan belanja terbesar juga terjadi pada belanja pegawai. Terjadinya mutasi pegawai, kematian, dan kekosongan jabatan selama tahun anggaran tersebut merupakan penyebab utama terjadinya penghematan terhadap belanja pegawai.

#### c. Sisa Dana Kegiatan

Dalam tahun anggaran 2016 juga terdapat beberapa program dan kegiatan yang telah dianggarkan Pemerintah Provinsi, namun belum dilaksanakan maupun

yang telah dilaksanakan tetapi masih memiliki sisa dana sehingga perlu disetorkan kembali kepada Bendahara Umum Daerah. Penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2016, total keseluruhan saldo uang untuk dipertanggungjawabkan dalam kas bendahara pengeluaran dari setiap Satuan Kerja dilingkup Provinsi NTT yang belum disetor kepada BUD adalah sebesar Rp 2.386.855.412,00.

#### 5. Tahun Anggaran 2017

Pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh SILPA Rp 273.576.825.165.00. SILPA tersebut merupakan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi selama satu tahun anggaran. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi NTT selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 5.7.

Tabel 5.7  
Perolehan SILPA pada APBD Pemerintah Provinsi NTT  
Tahun Anggaran 2017 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)
Pendapatan Daerah	4.797.226.620.000	4.700.213.492.589	(97.013.127.411)
Belanja Daerah	5.008.145.707.768	(4.634.876.188.617)	373.269.519.151
<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>65.337.303.972</b>	
Penerimaan Pembiayaan	290.459.087.768	287.775.321.193	(2.683.766.575)
Pengeluaran Pembiayaan	79.540.000.000	(79.535.800.000)	(4.200.000)
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>208.239.521.193</b>	
<b>SILPA</b>		<b>273.576.825.165</b>	

*Sumber : BPPKAD Provinsi NTT (APBD Provinsi NTT), 2018*

Data tabel 5.7 menunjukkan bahwa penyumbang terbesar dalam jumlah SILPA yang timbul pada tahun anggaran 2017 yaitu penghematan belanja daerah yang terjadi sebesar Rp 65.337.303.972,00.

Berdasarkan data pada tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya SILPA pada APBD Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017 adalah :

a. Penghematan Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Provinsi NTT melakukan penghematan belanja sebesar Rp373.269.519.151,00. Penghematan belanja daerah yang paling besar jumlahnya adalah item belanja tidak langsung dalam hal ini oleh item belanja pegawai yang dilakukan Pemerintah NTT. Penghematan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap belanja pegawai didasari oleh terjadinya mutasi pegawai, kematian, bahkan adapula jabatan yang tidak terisi. Hal ini ditunjukkan oleh anggaran belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp1.315.082.527.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 1.261.870.373.634,00 sehingga mengakibatkan belanja pegawai mengalami penghematan sebesar Rp 53.212.153.366,00.

b. Sisa Dana Kegiatan

Dalam tahun anggaran 2017 juga terdapat beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi namun belum dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan tetapi masih memiliki sisa dana sehingga perlu disetor kembali kepada Bendahara Umum Daerah. Namun hasil penelitian menunjukkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, total keseluruhan saldo uang untuk

dipertanggungjawabkan dalam kas bendahara pengeluaran setiap Satuan Kerja dilingkup Provinsi NTT belum disetorkan kepada BUD adalah sebesar Rp 13.586.687.651,00. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa adanya sisa uang tersebut disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga harus dikembalikan ke kas daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa perencanaan anggaran baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan merupakan peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena perencanaan yang tidak tepat dapat menghasilkan kinerja pengelolaan Pemerintah Daerah yang tidak memuaskan.

Demikian halnya dengan terjadinya SILPA yang jumlahnya berfluktuasi pada APBD pemerintah provinsi NTT selama tahun anggaran 2013-2017, memberikan gambaran sinyal adanya kinerja anggaran yang cenderung baik selama periode tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2015:72) mengatakan bahwa SILPA merepresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah sehingga dikatakan telah terjadi efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa SILPA tersebut memberikan sinyal adanya kinerja anggaran yang baik pada tahun anggaran yang bersangkutan.